

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif untuk Meningkatkan Partisipasi Komite Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pantai Labu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, karakteristik Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif yang dikembangkan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata sekolah dasar negeri di Kecamatan Pantai Labu. Model ini mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan siklus adaptif yang meliputi tahap *growth*, *conservation*, *release*, dan *reorganization*. Integrasi tersebut menjadikan model tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap kondisi masing-masing sekolah. Dengan demikian, model ini dapat membantu sekolah dan komite sekolah dalam melakukan pemetaan kebutuhan, penguatan kapasitas, pelaksanaan program, refleksi, serta perbaikan strategi secara berkelanjutan.

Kedua, kelayakan Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif secara konseptual menunjukkan bahwa model ini relevan dengan kebutuhan pemberdayaan komite sekolah. Model yang dikembangkan memiliki dasar teoretis yang kuat, komponen yang jelas, serta sesuai dengan permasalahan partisipasi komite sekolah yang selama ini masih cenderung administratif dan belum optimal.

Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif memperoleh rata-rata kelayakan sebesar 85,60% dengan kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan layak digunakan setelah melalui revisi berdasarkan masukan validator. Dengan demikian, Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif dapat dinyatakan layak digunakan sebagai model pemberdayaan komite sekolah setelah melalui proses validasi ahli dan revisi berdasarkan masukan validator.

Ketiga, efektivitas Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif terlihat dari adanya peningkatan partisipasi komite sekolah pada seluruh aspek yang diukur, yaitu *advisory*, *supporting*, *controlling*, dan *mediating*. Hasil pretest dan posttest menunjukkan bahwa skor rata-rata partisipasi meningkat dari 30,70 menjadi 79,90, dengan selisih sebesar 49,20. Nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,71 berada pada kategori tinggi, sehingga model yang dikembangkan dapat dinyatakan cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi komite sekolah. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek *mediating* dengan N-Gain 0,75, sedangkan aspek *controlling* memperoleh N-Gain 0,63, tetapi tetap berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa model adaptif mampu mendorong perubahan peran komite sekolah dari sekadar pelengkap administratif menjadi mitra strategis sekolah dalam perencanaan, dukungan program, pengawasan, dan mediasi antara sekolah dengan masyarakat.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif merupakan model yang relevan, kontekstual, dan cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah

dasar negeri di Kecamatan Pantai Labu, terutama dalam menjalankan fungsi *advisory, supporting, controlling, dan mediating*.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif dapat memperkaya kajian manajemen pendidikan, khususnya dalam pemberdayaan komite sekolah sebagai mitra strategis sekolah. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi komite sekolah memerlukan pendekatan manajerial yang sistematis, kolaboratif, dan adaptif. Model yang dikembangkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait manajemen kolaboratif antara sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu tata kelola pendidikan.
2. Implikasi praktis bagi kepala sekolah adalah bahwa kepala sekolah perlu memandang komite sekolah sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai lembaga formal yang hadir dalam rapat atau memberikan persetujuan administratif. Model ini memberikan arah bagi sekolah untuk melibatkan komite sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program sekolah. Dengan penerapan model ini, hubungan antara sekolah dan komite dapat menjadi lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan nyata.
3. Implikasi bagi komite sekolah adalah perlunya peningkatan kapasitas anggota komite dalam memahami tugas, fungsi, dan peran strategisnya

sesuai dengan kebutuhan sekolah. Komite sekolah perlu diberdayakan agar mampu memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi secara lebih aktif. Dengan demikian, komite sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendukung formal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem tata kelola sekolah yang partisipatif dan akuntabel.

4. Implikasi bagi dinas pendidikan dan pemangku kebijakan adalah perlunya penyusunan program pembinaan komite sekolah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Dinas pendidikan dapat menggunakan model ini sebagai salah satu acuan dalam merancang pelatihan, pendampingan, dan evaluasi peran komite sekolah. Pemberdayaan komite sekolah perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas manajerial, pemahaman regulasi, kemampuan komunikasi, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan pendidikan.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi kepala sekolah, disarankan agar lebih aktif melibatkan komite sekolah dalam setiap proses pengelolaan pendidikan, terutama dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi. Kepala sekolah perlu membangun pola komunikasi yang lebih terbuka.
2. Bagi komite sekolah, disarankan agar meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi komite, khususnya dalam menjalankan peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

Komite sekolah perlu lebih aktif mengikuti rapat, memberikan masukan, membantu program sekolah, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta menjembatani komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

3. Bagi dinas pendidikan, disarankan agar menyusun program pembinaan dan pelatihan komite sekolah secara berkala. Pelatihan tersebut dapat mencakup pemahaman regulasi, manajemen sekolah, komunikasi partisipatif, penyusunan program, pengawasan, dan evaluasi. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, komite sekolah diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara lebih optimal.
4. Bagi sekolah dasar negeri di Kecamatan Pantai Labu, disarankan agar Model Manajemen Pemberdayaan Berbasis Adaptif dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan partisipasi komite sekolah. Model ini dapat diterapkan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing sekolah, baik dari segi sumber daya manusia, karakteristik masyarakat, maupun kebutuhan program pendidikan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan pengujian model pada wilayah yang lebih luas dan jumlah responden yang lebih besar.